

BORDER PROBLEM

1. Apa inti persoalannya?

Baru-baru ini, isu **perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia**, khususnya di **Sabah (Malaysia) — Kalimantan Utara (Indonesia)**, memicu perdebatan di Parlemen Malaysia setelah muncul laporan di media bahwa:

- Indonesia diklaim **mendapatkan 5.207 ha tanah dari Malaysia sebagai “kompensasi”** untuk tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara — **klaim yang menimbulkan kontroversi.** ([South China Morning Post](#))

Perdana Menteri Malaysia **Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa klaim itu salah, “tidak benar”, dan bukan merupakan hasil dari kompromi atau pertukaran wilayah yang diberi atau diserahkan.** Ia mengatakan bahwa perbatasan ditetapkan berdasarkan **perjanjian dan konvensi historis** yang berlaku, bukan konsep kompensasi. ([The Star](#))

2. Perdebatan di Parlemen Malaysia

MY Pemerintah Malaysia (Perdana Menteri Anwar Ibrahim)

- Anwar menjelaskan di Parlemen bahwa klaim seputar **penyerahan 5.207 ha kepada Indonesia adalah fitnah / tidak benar.** Sebaliknya, menurut pemerintah:

- Negara tetap berpegang pada **konvensi perbatasan internasional** yang diwariskan dari era kolonial (1891, 1915, 1928). ([The Star](#))
- Dalam beberapa bagian perbatasan yang belum terselesaikan disebut **Outstanding Boundary Problems (OBP)**, hasil survei ulang bisa saja mengubah garis, tapi itu bukan **penyerahan wilayah** sebagaimana diklaim. ([The Star](#))
- Malaysia justru mendapatkan tambahan sekitar **780 hektare** di sektor Sungai Sinapad–Sungai Sesai, sementara zona lain dipandang masih berada di bawah administrasi Indonesia hingga perundingan selesai. ([The Star](#))
- PM juga menekankan pentingnya **menjaga hubungan baik dengan Indonesia** dan mengajak pihak parlemen untuk berhati-hati dalam berbicara agar tidak merusak hubungan bilateral. ([VOI](#))

Reaksi dari Anggota Parlemen / Oposisi

- Beberapa anggota parlemen dari pihak oposisi mengkritik pemerintah karena:
 - Debat tentang isu ini tidak sepenuhnya terbuka; sebagian anggota merasa penjelasan satu arah (hanya dari PM) **tidak cukup**. ([VOI](#))
 - Ada dorongan untuk **membuka kembali debat guna diskusi lebih luas**, termasuk untuk memastikan bahwa semua prosedur konstitusional terpenuhi (termasuk

persetujuan legislatif di tingkat negara bagian Sabah).
([Reddit](#))

- Ada yang mengatakan bahwa menolak debat lebih lanjut terlihat seperti **menolak pengawasan parlemen atas masalah kedaulatan**. ([The Vibes](#))
-

3. Konteks teknis sengketa perbatasan

Isu yang dibahas bukan soal klaim baru secara sepihak, tetapi bagian dari proses **penentuan dan penegasan garis perbatasan yang belum final (OBP)** antara Malaysia dan Indonesia yang telah melalui:

- **Negosiasi teknis dan survei bersama sejak 1977.**
- Perjanjian dan konvensi historis yang masih menjadi dasar hukum perbatasan. ([The Star](#))

Beberapa detail penting:

- Malaysia menghasilkan **penambahan 780 ha** kawasan di bagian sungai tertentu setelah mediasi dengan Indonesia. ([The Star](#))
 - Sejumlah kawasan lain masih dianggap sebagai **OBP yang proses finalisasinya belum selesai**. ([The Star](#))
-

Kesimpulan

- **Isu utama di Parlemen Malaysia bukan bahwa Malaysia “menyerahkan” wilayah, tetapi reaksi terhadap klaim yang**

beredar di media — dan cara pemerintah menjelaskan serta menanganinya. ([South China Morning Post](#))

- Pemerintah menolak tuduhan “penyerahan” tanah dan menekankan bahwa semua dilakukan melalui **negosiasi teknis sesuai aturan internasional dan sejarah perjanjian.** ([The Star](#))
- Dewan Rakyat menjadi arena debat soal **transparansi, kedaulatan, dan hubungan diplomatik** dengan Indonesia dalam konteks isu perbatasan tersebut. ([VOI](#))